

Judul : Masalah Terus Berulang
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Masalah Terus Berulang

DPR-Pemerintah Gagal Belajar

JAKARTA, KOMPAS – Gagal belajar dari pengalaman. Itulah gambaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut. Seperti yang pernah terjadi, pembuat undang-undang kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek mereka.

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dan pemerintah saat ini sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017. Pekan lalu, Panitia Khusus DPR bersama pemerintah kembali gagal menyepakati lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada Rapat Paripurna DPR, 20 Juli mendatang.

Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi per daerah

Soal RUU Penyelenggaraan Pemilu

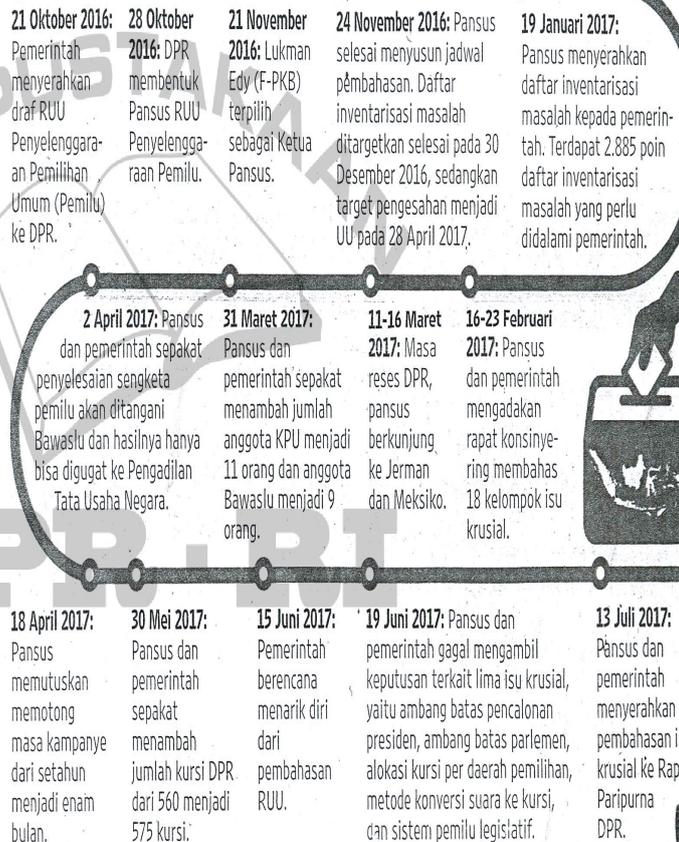
HAL 4 DAN 5

pemilihan saat pemilu legislatif, sistem pemilu legislatif, dan ambang batas parlemen.

Dari kelima isu itu, ambang batas pencalonan presiden, untuk menentukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, jadi yang paling alot. Sepuluh partai politik di DPR dan pemerintah bersikukuh dengan sikapnya.

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

TARIK ULUR RUU PENYELENGGARAAN PEMILU



Sumber: Litbang "Kompas"/YOG/LUP, dari Undang-Undang Pemilu (No 12/2003, No 10/2008, dan No 8/2012) dan pemberitaan "kompas" INFOGRAFIK: GUNAWAN